

**GERAKAN PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN (KASUS PEMBENTUKAN
PROPINSI JAMBI 1946-1958)**

Budi Purnomo, Nelly Indrayani
FKIP, Universitas Jambi
e-mail: budipurnomo@unja.ac.id, nelly.indrayani@unja.ac.id

ABSTRAK

Abstrak - Penetapan Jambi menjadi provinsi Sumatera Tengah berdasarkan keputusan KNI Sumatera tingkat daerah 18 April 1946 di Bukittinggi, dan desentralisasi Sumatera Tengah, serta diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1948 dan UU No. 15 tahun 1949 dilakukan tanpa melihat perkembangan dan keinginan rakyat Jambi dari faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, historis, dan adat. Sebagian Jambi meanggap hal ini telah merenggut hak-hak demokrasi rakyat. Kajian ini melihat bagaimana gerakan pasca proklamasi kemerdekaan pada kasus pembentukan Propinsi Jambi 1946-1958. Dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada sumber sekunder, penelitian ini mengidentifikasi jabaran kasus pembentukan Provinsi Jambi 1946-1958. Gerakan pasca proklamasi ini melahirkan pergolakan masyarakat. Mereka mencoba memisahkan Jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan dari perspektif yang sesuai secara politis dan tepat (menurut masyarakat Jambi). Tuntutan masyarakat atas wilayah otonomi provinsi adalah tuntutan ketidakadilan (keseimbangan keuangan) dan upaya penyelesaian konflik (perebutan kekuasaan). Dari segi geografis, sosiologis, ekonomi, dan politisi wilayah Jambi telah mampu menjadi otonom tingkat provinsi.

Kata kunci: *Gerakan, proklamasi, kemerdekaan, pembentukan provinsi Jambi*

**MOVEMENT POST PROCLAMATION OF INDEPENDENCE (CASE OF FORMATION
JAMBI PROVINCE 1946-1958)**

Budi Purnomo, Nelly Indrayani
e-mail: budipurnomo@unja.ac.id, nelly.indrayani@unja.ac.id

Abstract - The determination of Jambi to be a Central Sumatra province was based on the decision of the regional level KNI of April 18 1946, in Bukittinggi, and the decentralization of Central Sumatra and the enactment of Government Regulation No. 10 of 1948 and Law No. 15 of 1949 carried out without looking at the development and desire of the people of Jambi from political, social, economical, historical, and customary factors. Some of Jambi thought that this had taken away people's democratic rights. This study looks at how the movement after the proclamation of independence in the case of the formation of Jambi Province 1946-1958. By using historical methods that emphasize secondary sources, this study identifies the case description of the formation of Jambi Province 1946-1958. This post-proclamation movement gave birth to public upheaval. They tried to separate Jambi from Central Sumatra to South Sumatra from a politically appropriate perspective (according to the Jambi people). The community demands for the province's autonomy are demands for injustice (financial balance) and conflict resolution efforts (power struggles). Regarding geographical, sociological, economic, and politicians, the Jambi region has been able to become autonomous at the provincial level.

Keywords: *Movement, proclamation, independence, establishment of jambi province*

PENDAHULUAN

Penetapan Keresidenan Jambi kedalam provinsi Sumatera Tengah berdasarkan keputusan sidang KNI daerah Sumatera 18 April 1946 di Bukittinggi, dan desentralisasi Sumatera tengah serta diberlakukannya PP No. 10 Tahun 1948 dan UU No. 15 Tahun 1949 tanpa melihat perkembangan dan keinginan masyarakat Jambi serta faktor-faktor politis, sosiologis, ekonomis, historis, dan adat istiadat dipandang oleh sebagian masyarakat Jambi telah memperkosa hak-hak demokrasi rakyat.

Pada akhirnya, melahirkan pergolakan, dan prokontra masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan berupaya memisahkan daerah jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan yang dipandang dari segi politis cocok dan sesuai dengan mereka. Kurangnya alat transportasi dan rusaknya jalan-jalan mengakibatkan sulitnya daerah Jambi berhubungan dengan pusat Provinsi di Medan dan Sumatera Tengah di Bukittinggi. Keadaan ini menumbuh kembangkan gerakan-gerakan rakyat Jambi untuk memisahkan daerah jambi dari Sumatera Tengah ke Sumatera Selatan. Munculnya gerakan Fropedja 10 April 1954 yang mendapat dukungan dari kalangan otoritas dan partai-partai politik memberikan wacana baru bagi masyarakat jambi. Gerakan Fropedja yang semula mendapat tentangan dari kelompok pemuda H. P. Merbahari mampu mengakhiri prokontra masyarakat Jambi dan menuntut tegaknya Provinsi Jambi.

Tuntutan rakyat jambi yang dibawa oleh Mr. Nasroen disetujui oleh KUDO. Kemudian diserahkan kepada parlemen. Tetapi tak kunjung diberi keputusan, karena itu BKRD merasa perlu mencari dan menjalin dukungan dari kekuatan politik, seperti partai politik, ormas, mantan pejuang, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan Dewan Banteng dan Dewan Garuda.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan historis dengan menekankan pada sumber sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumen (arsip), wawancara (sejarah lisan). Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Peneliti mengumpulkan

dan mengeksplorasi semua sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis. Baik sumber tertulis, sumber materi, dan sumber lisan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber penulisan adalah laporan, arsip, manuskrip, surat kabar, majalah, dan buku ilmiah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan melakukan studi perpustakaan. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian sumber kritik. Menganalisis semua sumber yang telah dikumpulkan, yang relevan dengan penelitian yang akan diangkat. Selanjutnya, akan ditafsirkan sumber-sumber yang telah dikritik dan diungkapkan dalam bentuk penulisan sejarah dalam karya ilmiah

PEMBAHASAN

Gerakan Fropedja

Konflik dua kelompok masyarakat itu semakin tajam, karena tidak terakomodasinya keinginan itu oleh pemerintah pusat. Kebutuhan (deadlock) percaturan politik ini melahirkan suatu gerakan yang dipelopori oleh gerakan Front Pemuda Jambi (Fropedja). Fropedja merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan 21 Februari 1954 di Merangin, Bangko. Fropedja mempunyai struktur kepengurusan yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris I dan II, bendahara, anggota, komisaris, kewedanan dan perwakilan di Jambi. Pada 10 April 1954, Fropedja yang diketahui oleh Nangju dan wakil ketua MK. Soebroto menuntut supaya daerah jambi dan Kerinci dijadikan satu daerah otonom tingkat satu provinsi. Tuntutan itu diserahkan secara langsung kepada bung Hatta di Bangko.

Tuntutan tersebut merupakan pernyataan resmi pertama yang dibuat oleh masyarakat jambi. Meskipun sebelumnya terdapat pernyataan partai NU pada bulan Januari 1954 dan PNI pada bulan April 1954 dalam suatu rapat, yang memutuskan supaya daerah Keresidenan Jambi dijadikan daerah otonom setingkat provinsi tetap menyatakan kedua partai itu hanya disampaikan kepada pengurus pusatnya di Jakarta dan tidak disebarluaskan kepada masyarakat (Meng, 1994, p. 38). Gerakan Fropedja ini mendapat simpata yang besar baik dari kalangan autoritas, diantaranya dari A. Laman, patih Kabupaten Merangin, Jusuf Nasri, Wedana Bangko, Rd. M.

S Jarifs, Wedana Muaro Bungo, M. Soeher, Wedana Muaro Tebo dan para camat serta para Pasirah di Bangkomaupun dari lapisan masyarakat. Fropedja juga mendapat dukungan dari seorang tokoh Kerinci yaitu Sati Gelar Depati anoem. Mantan kepala Mendapo keliling danau dan anggota Minangkabau RAAD di Padang. Pada tahun 1954 dalam suatu pertemuan di Bangko, Beliau mengatakan bahwa Pucuk Jambi sembilan Lurah tidak lengkap kalau tidak termasuk di dalamnya Kerinci dan Kincai bukan bernama kincai kalau tidak berada di dalam wilayah Jambi sebab Kinjai hanya ada di daerah Jambi sejak zaman Sultan.

Kendala

Gerakan Fropedja yang dibentuk 10 april 1954, ditentang oleh himpunan pemuda merangin batanghari (H.P Merbahari). H.P Merbahari merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan pada 22 mei 1952 di jakarta yang kemudian berpusat di jambi, kabupaten batanghari. organisasi pemuda ini lebih banyak memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan. H. P Merbahari diketuai oleh Kms. H Abdullah dan wakil ketua Imran Nungcik Abdullah mempunyai pandangan lebih condong mendukung integrasi daerah jambi ke provinsi sumatera selatan. Pandangan yang berbeda dari kedua organisasi pemuda itu akhirnya melahirkan suatu konflik. Konflik semakin meruncing seiring dengan maraknya dukungan ke berbagai kelompok. Untuk mengatasi konflik berkepanjangan akhirnya dicapai suatu kompromi untuk mengadakan suatu kongres pemuda sederhana jambi.

Kongres berlangsung pada tanggal 30 April - 3 Mei 1954 bertempat di kantor Rubber Societiet jalan Batanghari Jambi. Kongres dihadiri oleh utusan para pelajar dari Medan, Padang, Palembang, Jakarta dan Yogyakarta serta dihadiri oleh R. Abdurrahman, mantan komandan korem 042 Garuda Putih jambi. Opini peserta kongres dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) kelompok yang menginginkan integrasi daerah jambi ke dalam sumatera selatan. (2) kelompok yang menginginkan daerah jambi tetap berada

dalam wilayah sumatera tengah. (3) kelompok yang menuntut supaya daerah jambi dijadikan daerah tingkat satu provinsi. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya secara aklamasi kongres memutuskan yaitu (Ripin, 1976, p.19) : (1) membentuk Dewan Permusyawaratan Pemuda Daerah Jambi, (2) menuntut kepada pemerintah pusat agar daerah jambi yang terdiri dari dua kabupaten lepas dari Sumatera Tengah dan dibentuk daerah otonom setingkat provinsi. Untuk menindaklanjuti tuntunan tersebut kongres menunjuk tiga orang delegasi yaitu A. Thanafiah, R. Abdullah dan H. Said serta Sjamsoe Bahroen sebagai penasehat untuk menghadap parlemen (DPR RI) dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Delegasi diterima oleh parlemen, seksi dalam negeri yang diketuai oleh Sjamsuddin Sultan Makmur. Kemudian delegasi menghadap menteri dalam negeri Prof. Dr. Mr Hazairin untuk menyampaikan tuntutannya tersebut. Sjamsuddin Sultan Makmur maupun Hazairin menilai bahwa keputusan kongres pemuda itu merupakan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Peran Kekuatan Politik

Keputusan kongres pemuda sederhana jambi, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Diantaranya partai politik.. Partai politik yang awalnya mendukung integrasi daerah jambi ke sumatera selatan berbalik mendukung keputusan kongres pemuda. Usman Meng (1994, p. 30) mengatakan bahwa partai-partai politik yang berdiri setelah Maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16 Desember 1945 ini pada tanggal 22 Agustus 1955 mendukung keputusan kongres pemuda. Konferensi pamong desa pada tanggal 16 hingga 18 januari 1955 bertempat di gedung bioskop murni jambi juga mendukung keputusan kongres pemuda. Konferensi menunjuk dua orang delegasi yaitu Basjaruddin Pasirah Marga Nalo Tantan dan EM. Jutar, wakil ketua DPM berbak Kabupaten Batanghari. Delegasi bertugas menyerahkan resolusi kepada menteri dalam negeri di Jakarta (Resolusi Konferensi Pasirah/DPM Sedaerah Jambi 16-18 Januari 1955).

Dukungan atau tuntutan serupa berasal dari Dewan Derwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Merangin melalui sidang plenonya

pada 13 Maret 1955 seperti ditegaskan oleh A. Darjis bebas tani, Bupati Merangin bahwa tuntutan jambi berprovinsi sebagai tuntutan yang logis dan tidak dibuat-buat untuk kepentingan ke daerahan semata. Kemudian pada tanggal 16 hingga 18 April 1955 diadakan Rapat raksasa rakyat sederhana Jambi. Rapat raksasa (voor congress) di aula kompi Muaro Tebo dihadiri oleh utusan dari tiap-tiap marga. Ada 41 marga, dan setiap marga mengirim lima utusan yang terdiri dari pemuda, alim ulama, cerdik pandai, tuo tengganai dan Dewan Marga. Rapat juga dihadiri oleh beberapa orang peninjau tokoh-tokoh masyarakat dari kota besar jambi dan Batanghari. Rapat raksasa ditutup dengan rapat umum di lapangan depan kantor polisi Muara Tebo. Sebagai pembicara Kms. A. Gafar Dung, tokoh politik daerah jambi, Jahja Jojong ketua DPRDS Merangin dan pembaca doa KH. M. Nawawi.

Rapat raksasa yang diketuai oleh Jahja Jojong ini mendesak kepada pemerintah pusat supaya daerahnya diberikan hak otonomi setingkat provinsi segera menjadi kenyataan (Resolusi Rapat Raksasa Rakyat Jambi pada tanggal 16-18 April 1955 di Muaro Tebo). Rapat menetapkan dua orang delegasi yaitu Jahja Jojong, ketua DPRDS Merangin dan fraksi Masyumi dan Harun Amin, tokoh PSI Kabupaten Merangin. Delegasi diamanatkan untuk melakukan audience dengan pimpinan partai tingkat pusat, terutama partai oposisi (partai Masyumi dan PSI) pada kabinet Ali Wongso Arifin, dan mengantar resolusi kepada pemerintah pusat. Delegasi diterima dr. Sukiman, salah seorang ketua partai Masyumi di kantor Masyumi jalan Kramat 45 Jakarta dan Sultan Sjahrir ketua umum PSI dan Juir Muhammad anggota parlemen dari fraksi PSI di kantor PSI kebon kacang VI No. 39 Jakarta.

Badan Kongres Rakyat Jambi

Kongres Rakyat Sederah Jambi 15-18 Juni 1955 di gedung Bioskop Capitol (Bioskop Duta) dihadiri oleh tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan partai politik, organisasi massa, pembesar sipil maupun militer. Hadir pula, Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo dan Mr. Nasrun dari KUDO serta seluruh anggota

DPRDS Batanghari, Merangin, dan Kota Besar Jambi. Jumlah massa yang hadir 426 orang. Tanggal 18 Juni 1955 kongres ditutup dengan rapat umum bertempat di lapangan Tungkal (Terminal Rawasari). Kongres yang dipimpin oleh H. Hanafie memutuskan yaitu menuntut pemerintah pusat agar daerah Jambi diberi otonomi setingkat provinsi. Untuk memperjuangkan tuntutan itu dibentuk Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) (Ripin, 1976, p.20). BKRD dijadikan satu-satunya aspirasinya masyarakat Jambi.

BKRD beranggotakan 36 orang terdiri dari Sembilan orang dipilih langsung oleh kongres 16 orang utusan dari setiap kewedanan dan kota Jambi, 10 orang wakil dari partai politik dan satu orang wakil dari organisasi bekas pejuang. Struktur BKRD terdiri dari badan harian dan badan pleno. Badan harian berjumlah Sembilan orang yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lima anggota. Sembilan orang ini dipilih langsung oleh kongres dan menduduki jabatan sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Badan pleno terdiri dari 29 orang sesuai dengan pasal V (Anggaran Dasar BKRD yang disahkan pada tanggal 15 Juli 1955). Untuk mendukung kinerjanya, BKRD membuka perwakilan BKRD di setiap kewedanan dan dimarga atau kampung dalam kota Jambi.

Untuk melaksanakan amanat kongres rakyat, BKRD menetapkan tiga delegasi yang akan berangkat ke Jakarta. Ada tiga delegasi yaitu, H. Hanafie, Ketua BKRD, Ibrahim, Sekretaris BKRD dan R. Suhur, bendahara BKRD. Untuk menemui seksi G (Seksi Dalam Negeri) Parlemen yaitu Maridi Danukusumo, A.R Baswedan dan Ardi Winangun. Seksi G memahami tuntutan rakyat Jambi dan akan membawa tuntutan itu pada sidang seksi G yang akan datang. Delegasi juga menghadap Soetardjo, Ketua KUDO Kementerian Dalam Negeri, Soetardjo menyatakan bahwa tuntutan rakyat Jambitelah disetujui oleh KUDO dan telah diserahkan kepada parlemen. Merasa tidak puas, pada 27 Agustus 1955 delegasi menghadap Mr. Soenarjo, Menteri Dalam Negeri, pimpinan Partai Masyumi, Ibrahim menemui pimpinan PRN dan R. Suhur menemui pimpinan PIR.

BKRD dalam sidang pleno 24-25 November 1956 di Muara Bungo, mengirim kembali delegasi ke Jakarta. Ada tujuh orang delegasi yang dipimpin oleh Djamin Gelar Datuk

Bagino (Keputusan Sidang Pleno BKRD pada tanggal 24-25 November 1956 di Muaro Bungo). Keputusan sidang pleno dikirim kepada seluruh Asisten Wedana kecamatan di daerah Jambi. Pasirah-pasirah Kepala Marga dan seluruh anggota pleno BKRD (Surat BKRD No. 74/BKRD/56 Tanggal 5 Desember 1956). Dewan Banteng mengusulkan keberangkatan delegasi ke Jakarta ditunda dahulu sesuai dengan reuni ex devisi Banteng 24 November 1956 (Surat Dewan Banteng Sumatera Tengah, No. 046/DBST/56 tanggal 19 Desember 1956). Karena putusan dari ex reuni devisi Banteng Sumatera Tengah dengan sendirinya termasuk tuntutan saudara-saudara dari Jambi. Dewan Banteng akan mengambil langkah pertama dalam pelaksanaan putusan reuni tersebut.

Dewan Banteng pada 20 Desember 1959 mengambil alih pemerintahan dari Gurbenur Ruslan Mulhardjo ke Ahmad Husein yang diangkat oleh Dewan Banteng sebagai ketua Daerah Sumatera Tengah dan Mayor Sofjan Ibrahim sebagai Kepala Staf Sipil yang berkedudukan di Bukittinggi. Upacara serah terima jabatan dihadiri oleh para anggota DPRDS Sumatera Tengah. Pejabat Kepala Polisi Sumatera Tengah juga diserahkan terimakan dari Komisarisi Polisi R.M. Soewarno Tjokroningrat kepada Komisarisi Polisi ST Suis (Majalah Penerangan Sumatera Tengah, No. Dan tanggalnya hilang). Kemudian, pada tanggal 26 Desember 1956 Utusan BKRD yang dipimpin oleh Djamin Gelar Datuk Bagindo menemui Ahmad Husein untuk merundingkan persoalan pemerintahan Jambi dan menyampaikan hasrat rakyat Jambi. Melihat perkembangan yang terjadi di Jambi maupun Sumatera Tengah Panglima T.T II Sriwijaya Penguasa Militer Sumatera Selatan dan Jambi mengeluarkan maklumat (Maklumat Panglima/Penguasa Militer TERR II Sriwijaya No. PM-001/12/1956 Tanggal 31 Desember 1956). Isinya bahwa Sumatera Selatan (Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Jambi) berada dalam keadaan darurat perang (Staat van Oorlog en van beleg) sesuai keputusan presiden RI No.201 tanggal 29 Desember 1956. Kepada semua instansi sipil diminta untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih seksama dan seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan waspada terhadap segala hasutan dan kabar-

kabar provokatif yang tertuang dalam isi Kongres Pemuda seditaerah Jambi 3- 5 Januari 1957, Panglima/Penguasa Militer T.T. II Sriwijaya mengeluarkan Maklumat No. PM-002/1/1957 tertanggal 4 Januari 1957.

Kepentingan

Perkembangan masyarakat yang demikian pesat dan pemerintahan yang telah dipraktekkan selama delapan tahun lebih, baik itu waktu revolusi maupun sesudah penyerahan kedaulatan maka susunan provinsi di Sumatera yang hanya ada tiga provinsi tidak dapat di pertahankan lagi. Barangkali tuntutan itutidak hanya terjadi di Jambi tetapi juga didaerah lain. Tuntutan mengenai status daerah Jambi menjadi daerah otonom setingkat provinsi merupakan tuntutan atas ketidakadilan (pertimbangan keuangan) dan upaya penyelesaian konflik (perimbangan kekuasaan) (Pidato Ibrahim, Sekertaris BKRD pada Kongres Rakyat Daerah Jambi tanggal 15-18 Juni 1956). Karena dipandang dari segi geografis, sosiologis, politis, dan ekonomi daerah Jambi telah dapat dan sudah selayaknya berotonomi sendiri setingkat provinsi.

Daerah Jambi dengan luas wilayahnya 53.435.72 km² dan jumlah penduduk 400.900 orang (BPS Kantor Statistik Provinsi Jambi, 1989, p.1). Kaya dengan sumber-sumber alamnya. Sumber-sumber alam itu seperti karet, rotan, kayu, damar, the, kopi, casiacera, tembakau, padi dan lain-lain di samping minyak bumi, emas pasir dan belerang. Daerah Jambi juga mempunyai curah hujan yang cukup tinggi sehingga cocok untuk areal pertanian dan perkebunan. Karet berkembang dengan pesat pada tahun 1912 harga karet Singapura telah mencapai F5.200.00 per ton (Mutholib, 1980, p. 29). Registrasi pada 1941 tercatat luas tanah daerah Jambi yang ditumbuhi pohon karet 188.578 hektar dengan produksi 75.662 ton (Kementerian Penerangan, 1953, pp. 677-678).

Bea cukai karet (1956) dari perlabuhan Jambi ke Singapura 34.491.551 kg dengan standard \$46.642.707 (kurs rp. 3.75) maka menjadi Rp. 17.491.015.188.75. ini beru ke Singapura belum yang ke Amerika dan Hongkong (Pidato Ibrahim, Sekertaris BKRD pada kongres Rakyat Daerah Jambi pada tanggal 15-18 Juni 1956). Bea karet istimewa 25% dari

Pelabuhan Jambi. Tidak heran bila Presiden Soekarno ketika itu mengatakan bahwa Jambi adalah satu daerah RI yang makmur, ekonominya berjalan baik, dapat mengeksport karet dan mengimpor barang dari luar negeri (Kementerian Penerangan, 1953, pp. 270-271). Hubungan dagang daerah Jambi sejak jaman kerajaan juga telah meluas tidak hanya di daerah nusantara saja tetapi telah merambah ke Manca Negara.

Faktor penyebab yang paling utama adalah secara geografis daerah Jambi dekat dengan Negara lain (Singapura) Streck maupun Sourry, menyebut bahwa Jambi merupakan penyalur bahan perdagangan yang penting (Abdullah, 1984, p. 14). Ia menjadi tempat penjualan merica (rempah-rempah) yang dihasilkan oleh daerah pedalaman minangkabau. Pemilik membawa merica ke Jambi dengan berlayar menyusuri sungai Batanghari. Merica Jambi sangat di butuhkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, banyak pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Belanda berdatangan ke Jambi. Belanda datang ke Jambi karena kesultanan Banten menolak untuk berhubungan dengan VOC. Saudagar Cina memainkan peranan utama dalam perdagangan tersebut dan sebagian besar ekspor lada ke Jawa (Jepara) dan dari Jawa, Jambi membeli beras, garam, sutera dan tekstil (Meilink, 1962, pp. 287-289).

Masuknya orang-orang Cina, Eropa dan Bumiputera yang berasal dari luar Jambi telah muncul sebagai golongan kapitalis di Jambi maka orang-orang setempat (orang Jambi) hanyalah bekerja sebagai pekerja upah di kebun-kebun besar. Dari segi politis, tuntutan rakyat Jambi tidak menyimpang dari UUDS RI pasal 22 ayat 2 yang berbunyi, sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan permohonan pada penguasa. UUDS RI pasal 131 sub 2 yang menyertakan, kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketidakadilan di dalam perimbangan kekuasaan, dapat dikatakan sejak Belanda mengadakan perombakan total terhadap struktur pemerintahan di atas tingkat dusun (Kesatuan pemerintahan yang terdiri dari beberapa kampung). Kesultanan dihapuskan dan juga jabatan kepala daerah yang selama ini di pegang oleh para anak raja (bangsawan).

Ini berarti penghancuran konsep tradisional mengenai state (negara) dan kingship yang selama berabad-abad dipegang oleh rakyat Jambi (Gullick, 1958, pp. 44-64). Akibatnya hubungan mereka (raja bangsawan) dengan rakyat terputus. Belanda sendiri sebagai pemerintah tidak dapat menggantikan tempat sultan sebagai pelindung dan pemerintahan adat dan agama. Contoh kasus, pengangkatan jabatan Kepala Distrik (Demang) hampir tidak mungkin dipegang oleh orang Jambi sendiri. Tidak ada orang Jambi berpendidikan modern. Pendidikan modern dimata orang Jambi adalah pendidikan kafir yang akan menjadikan anak-anak mereka kaki tangan kaum kafir seperti para demang (Gullick, 1958, p. 30). Jabatan demang dipegang oleh orang-orang dari luar daerah (orang Minangkabau dan Palembang). Bahkan kedudukan mereka sebagai Kepala Distrik (Demang) justru bertambah kuat. Hal ini memperkuat rasa ketidakpuasaan atau sentiment sebagian orang Jambi terhadap orang Minang. Sentiment terhadap orang Minang dibawa turun temurun. Bahkan hingga sekarang masih dijumpai dalam sekat-sekat kehidupan masyarakat, misalnya dalam soal perkawinan.

Aspek sosiologis (hubungan masyarakat) daerah Jambi bersatu didalam persatuan Pucuk Jambi Sembilan Lurah, satu perasaan dan satu cita-cita tidak mau dipisah-pisahkan dari sialang belantak besi (di Tanjung Samlidu) dan dari Durian di Takuk Rajo (di Ulu Sian Bangko) sampai ke Ujung Jabung (Selat Berhala). Apabila faktor tersebut dilupakan dalam pembentukan suatu otonomi daerah, niscaya akan timbul keadaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sudah cukup bukti, dimana timbul tuntutan diberbagai daerah yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintahan dibidang politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, pembangunan, kemasyarakatan, dan Angkatan Perang. (ANRI, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Nomor 111).

Tuntutan rakyat Jambi mempunyai dasar yang kuat dan tidak dapat dielakkan. Tuntutan yang telah diperjuangkan sejak 1946 dan belum pernah menjadi kenyataan. Sudah banyak delegasi yang dikirim ke Jakarta. Begitu juga tuntutan-tuntutan yang datang dari berbagai lapisan masyarakat. Pada akhirnya, persoalan tuntutan status daerah Jambi itu sering

menimbulkan bermacam-macam sentimental baik yang datang dari masyarakat maupun pihak pemerintah. Muncul tuduhan dari kalangan tertentu (propokator) bahwa tuntutan itu hanya berasal dari beberapa gelintir orang yang menginginkan kedudukan.

Terakumulasinya persoalan yang semakin kompleks dan perkembangan masyarakat dalam menghadapi tuntutan status daerah Jambi makin hari makin meluap. Sehingga 17 Juni 1956, Kongres Rakyat Jambi sepakat untuk membentuk Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD). BKRD lahir sebagai konsekuensi logis dari Kongres Rakyat Daerah Jambi 15-18 Juni 1956. BKRD dijadikan satu-satunya wadah perjuangan bagi rakyat Jambi untuk menuntut tegaknya Provinsi Jambi. BKRD dapat dikatakan sebagai sebuah jawaban dari anti klimaks persoalan atau aspirasi masyarakat yang tersumbat.

Proklamasi BKRD

Tuntutan status daerah Jambi yang telah diperjuangkan melalui berbagai saluran demokrasi parlementer telah berlarut-larut dan masih belum menjadi kenyataan, maka diadakan Kongres Pemuda Sedaerah Jambi. Kongres dihadiri oleh Organisasi-organisasi Pemuda, Organisasi Bekas Pejuang dan Kampung-kampung dalam Kota Besar Jambi. Isi Kongres mendesak BKRD yaitu (Resolusi Kongres Pemuda Sedaerah Jambi kedua yang berlangsung pada tanggal 3-5 Januari 1957 di Jambi) : (1) untuk tidak mengesahkan/menyetujui pembentukan Dewan Persiapan Provinsi Jambi tertanggal 21 Desember 1957 (2) Memproklamasikan secara de facto provinsi jambi selambat-lambatnya 9 Januari 1957 (3) Memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah dan berhubungan langsung dengan pemerintah pusat.

Kongres Pemuda akan mengambil sikap tegas, jika BKRD tidak bertanggung jawab atas tuntutannya. Menanggapi tuntutan kongres pemuda maka pada tanggal 6 Januari 1957 BKRD menyatakan secara de facto bahwa daerah otonom tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan Pemerintahan Pusat (Keputusan Pleno Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) keempat pada tanggal 6 Januari 1957 di Jambi). Dan mengusulkan sementara Djamin Gelar Datuk

Bagindo sebagai pemangku jabatan Gubernur Provinsi Jambi. Kemudian, BKRD akan segera mengirim sebuah delegasi untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Pertanyaan BKRD yang dikeluarkan 6 Januari 1957 merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Jambi. Awal dimulainya suatu tonggak baru bagi eksistensi daerah Jambi.

Untuk menjaga eksistensi daerah Jambi, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh R. Marjaya mendirikan suatu badan perjuangan yang bernama Gerakan Pembela Provinsi Djambi (GPPD). Badan ini mempersiapkan diri untuk mengantisipasi setiap usaha golongan tertentu yang akan merongrong proklamasi tersebut. karena itu, 8 Januari 1957 GPPD membuat dan menandatangani ikrar bersama. Ada 11 orang yang menandatangani ikrar bersama. Ikrar bersama ini bersemboyankan "Timbul Sama Terapung dan Tenggelam sama Terbenam" (Pernyataan Ikrar Bersama Gerakan Pembela Provinsi Djambi (GPPD) pada tanggal 8 Januari 1957 di Jambi).

Pertanyaan BKRD secara de facto tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Dewan Menteri atau kabinet 8 Januari 1959, menyatakan persetujuannya terhadap keputusan BKRD 6 Januari 1957. Dewan Banteng juga menyatakan persetujuannya yang disampaikan oleh Ketua Dewan Banteng Letkol. Ahmad Husein dalam pidato radionya melalui RRI Padang (Pidato Radio Ketua Dewan Banteng Sumatera Tengah pada tanggal 9 Januari 1957 melalui RRI Studi Padang). Isinya Dewan Banteng selaku Badan pelaksana dari putusan reuni 1 ex devisi banteng 24 November 1956, memutuskan untuk memberikan status otonomi tingkat 1 kepada daerah Riau dan Jambi (Leirisa, 1997, p. 52). BKRD 9 Januari 1957 mengirim delegasi untuk menghadap pemerintah pusat dan Panglima T.T.II Sriwijaya berkenaan dengan keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957. Delegasi ke Palembang terdiri dari Djamin Gelar Datuk Bagindo, H. Hanafie, Jusuf Nasry dan A. Hadi. Sedangkan ke Jakarta terdiri dari Kemas A. Gafar Dung, A. Madjid Batu, H.M. Kasim Agus, Hasan Jaapar Basjaruddin, Abdullah Umar dan A. Situmorang.

Kedatangan delegasi di Palembang diterima oleh panglima T.T II Sriwijaya dan

diputuskan bahwa masalah Daerah Jambi akan dibicarakan melalui rapat segitiga antara BKRD, Dewan Banteng, dan Panglima T.T II Sriwijaya seperti dalam suratnya No. B-001/SMP/57 tanggal 10 Januari 1957. (Surat Panglima/Penguasa Militer T.T II Sriwijaya No. B-001/SMP/57 kepada ketua/anggota BKRD tertanggal 10 Januari 1957). Keberangkatan delegasi ke Jakarta mendapat dukungan dari Sekretariat Komite PKI Batanghari (Telegram Sekretaris Komite RKI Batanghari kepada pemerintah pusat di Jakarta tanggal 10 Januari 1957). Bertepatan telegram dari Sekretaris Komite PKI Batanghari kepada pemerintah pusat atau sehari setelah keberangkatan delegasi ke Jakarta. RRI Jakarta menyiarkan pengumuman dari sidang kabinet bahwa kabinet menyetujui daerah Riau dan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat I Provinsi.

Persetujuan kabinet itu menimbulkan reaksi dari partai-partai politik di Kerinci, PNI Masyumi, NU, Perti, PSI dan PKI kemudian mengirim telegram kepada Menteri Dalam Negeri dan Seksi G Parlemen di Jakarta. Mereka menuntut direalisirnya daerah otonomi Kerinci tingkat II dan digabungkan dengan Provinsi Jambi. (Telegram partai-partai Politik di Kerinci kepada Menteri Dalam Negeri dan Seksi G Parlemen RI di Jakarta tertanggal 10 Januari 1957). Kemudian tuntutan itu dilanjutkan dengan mengadakan Kongres. Kongres 12 Januari 1957 itu diberi nama Kongres Rakyat Kerinci (Pernyataan Kongres Rakyat Kerinci pada tanggal 12 Januari 1957 di Sungai Penuh Kerinci). Seperti pada seloko adat mereka, empat diatas tiga dibaruh (di atas sama dengan Kerinci dibaruh sama dengan Jambi). Pertemuan segitiga antara Tengku Hitam Berdarah Putih di Inderapura. Pancardat dari Deputi Empat Delapan Helai Kain Kerinci dan Pangeran Tumenggungan Kerbau Dibukit dari Jambi juga membuat satu perjanjian.

Perjanjian itu diberi nama Sitingau Laut. Isi perjanjian, yaitu: rugi sama berugi, berlaba sama berlaba, datang musuh dari hilir sama-sama kehilir, datang musuh dari hulu sama-sama ke hulu, datang musuh dari tengah sama-sama dikupang, laut yang berdebur kepunyaan Deputi Empat Delapan Helai Kain, gunung yang memucak kepunyaan Tengku Hitam Berdarah Putih (Pernyataan Panitia Kongres Rakyat

Kerinci pada tanggal 12 Januari 1957 di Sungai Penuh). Perjanjian tersebut kemudian dipaterikan dengan memotong kerbau setengah dua ekor (kerbau mengandung) dan kepeng-sekepeng dibagi tiga, darahnya dikacau, daging dilapah dan tanduk digantungkan tinggi. Ini sebagai bukti bahwa Jambi dan Kerinci mempunyai persamaan.

BKRD melalui wakil ketuanya, Sjamsoe Bahroen pada 12 Januari 1957 menyampaikan pidato di Radio Jambi, bahwa pernyataan BKRD 6 Januari 1957 itu sesuai dengan pengumuman dan pengakuan dari Dewan Banteng yang disampaikan Letkol. Ahmad Husein melalui Radio Padang 9 Januari 1957 (Pidato Radio Sjamsoe Bahroen pada tanggal 12 Januari 1957 di Radio Jambi). Kemudian, RRI Jakarta 10 Januari 1957 juga telah menyiarkan pengumuman dari sidang kabinet telah menyetujui untuk dikeluarkannya Undang-undang biasa tentang keresidenan Jambi dan Riau sebagai daerah otonomi tingkat I provinsi.

Untuk menindaklanjuti Maklumat Panglima No. PM-002/1/1957, BKRD pada tanggal 18 Januari 1957 mengadakan sidang pleno. Sidang pleno dihadiri oleh wakil-wakil dari BKRD. Sidang menerima baik anjuran Panglima T.T. II Sriwijaya untuk mengadakan perundingan segitiga antara BKRD, Dewan Banteng dan Panglima T.T. II Sriwijaya. Untuk itu, BKRD 19 Januari 1957 menetapkan delegasi yang akan berangkat ke Palembang. Delegasi itu terdiri dari H. Hanafie, Mad Haan dan Jusuf Nasry dari BKRD, M. Salim dari tokoh masyarakat dan A. Hadi dari Ketua BKPD. Penasehat yaitu Djamin Gelar Datuk Bagindo, Residen Jambi dan M.O. Bafadol, anggota Palemen RI.

Rapat segitiga 21-22 Januari 1957 dipimpin oleh Panglima T.T. II Sriwijaya. Rapat mengambil keputusan yaitu (Pernyataan Bersama dalam Rapat Segitiga pada tanggal 21-22 Januari 1957 di Palembang). Dewan Banteng atas usul BKRD menetapkan seorang Acting Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi Jambidan mengesahkan staf dari Acting Gubernur atas usul Gubernur bersama BKRD. Keputusan ini terlihat mengabaikan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah pusat pada akhir bulan Januari 1957 memindahkan Djamin Gelar Datuk Bagindo, residen daerah Jambi sebagai calon pemangku jabatan Gubernur Jambi hasil Pleno

BKRD (Keputusan Pleno Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) keempat 5 Februari 1957 di Jambi) dan H.A Manaf (Anggota Dewan Banteng) yang menjabat Bupati Merangin keluar dari Jambi. Namun tindakan tersebut mendapatkan reaksi keras dari masyarakat Jambi yang berupa pernyataan atau resolusi dari berbagai lapisan masyarakat. Diantaranya : Resolusi Pejuang Islam 23 Januari 1957 yang diketuai A. Samad J (Pernyataan Pejuang Islam pada tanggal 23 Januari 1957 di Muaro Bungo). Alim Ulama Cerdik Pandai Marga VII Koto Muaro Tebo 1 Februari 1957 (Resolusi Alim Ulama Cerdik Pandai Marga VII Koto Muaro Tebo 1 Februari 1957 di Muaro Tebo). Radio Gram Dewan Banteng kepada H. Hanafie Ketua BKRD dan Djamin Gelar Datuk Bagindo Residen Jambi (Radio Gram Dewan Banteng pada tanggal 27 Januari 1957 kepada ketua BKRD dan Residen Jambi di Jambi).

Peresmian Provinsi Jambi

Menanggapi tudingannya itu, Letkol. Ahmad Husein mengatakan, hal itu memang merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan luhur rakyat direalisasikan dengan tindakan-tindakan yang radikal dan revolusioner (Pidato Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein pada peresmian Daerah Otonomi Tingkat 1 Jambi pada tanggal 8 Februari 1957 di Jambi).

Dewan Banteng siap sedia memikul konsekuensinya karena diyakini jalan menuju realisasi cita-cita dan keinginan luhur rakyat semesta. Dewan Banteng secara radikal, revolusioner dan konsekuen bertindak merealisasikan keputusan reuni ke satu ex Devisi Banteng tersebut. Diantaranya, Dewan Banteng membenarkan dan menyetujui keputusan Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) sebagai saluran keinginan dan hasrat seluruh rakyat Jambi untuk menjadikan Daerah Otonomi Tingkat 1 (Pidato Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein pada peresmian Daerah Otonomi Tingkat 1 Jambi pada tanggal 8 Februari 1957 di Jambi). Karena itu, BKRD diminta segera ke Padang dengan membawa usul penetapan Acting Gubernur dan staf supaya pelantikan dapat segera dilaksanakan di Jambi. Tindakan pemerintah pusat itu akhirnya gagal.

Tepat pukul 08:30 pagi 8 Februari 1957 upacara peresmian dimulai dengan pembukaan oleh seksi upacara KA. Gaffar Dung. Tampak hadir, Ketua Dewan Banteng Letkol. Ahmad Husein dan Staf, Panglima F.T. II Sriwijaya dan staf serta undangan lainnya. Tidak tampak pejabat pusat yang hadir.

Pembacaan Surat Keputusan Ketua Dewan Banteng No. 009/KD/U/KPts-57 tertanggal 8 Februari 1957 tentang pengangkatan Djamin Gelar Datuk Bagindo selaku Acting Gubernur dan H. Hanafie selaku wakil Acting Gubernur beserta 11 orang staf dilakukan oleh Mas Sulaiman. Sekretaris Jenderal Dewan Banteng (Surat Keputusan Ketua Dewan Banteng Sumatera Tengah No. 009/KD/U/Kpts-57 tertanggal 8 Februari 1957 ditetapkan di Padang). Kemudian, acara dilanjutkan dengan kantor Gubernur Provinsi Jambi disebelah kiri Rumah kediaman Gubernur.

Kesimpulan.

Keresidenan Jambi yang dimasukkan kedalam Sumatera Tengah mendapatkan tentangan secara politik dari rakyat Jambi untuk memisahkan diri dari Sumatera Tengah. Untuk mengakomodasi keinginan rakyat Jambi itu maka lahirlah Fropedja pada 10 April 1954. Dalam menjalankan usahanya Fropedja mendapat hambatan dari dalam organisasi itu sendiri karena adanya perbedaan pendapat dikalangan anggotanya, untuk mengatasi hal itu maka Fropedja melakukan kongres yang menghasilkan (1) membentuk Dewan Permusyawaratan Pemuda Daerah Jambi, (2) menuntut kepada pemerintah pusat agar Provinsi Jambi terdiri dari dua Kabupaten lepas dari Sumatera Tengah dan dibentuk daerah otonom setingkat Provinsi. Keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai partai politik dan organisasi yang ada di keresidenan Jambi. Untuk merealisasikan hasil kongres Fropedja sebelumnya, maka diadakan Kongres Rakyat Sedaerah Jambi 15-18 Juni 1955 yang menghasilkan pembentukan Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) sebagai organisasi yang bertujuan memperjuangkan pembentukan Provinsi Jambi. Perjuangan BKRD dan rakyat Jambi akhirnya membuahkan hasil dengan dibentuknya provinsi pada 8 Februari 1957

melalui Surat Keputusan Ketua Dewan Banteng No. 009/KD/U/Kpts-57.

Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar BKRD yang disyahkan 15 Juli 1955.
- ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 809.
- ANRI, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Nomor 111.
- Gullick, J.M (1958) *Indegenous Political Systems of Western Malaya*. Athlone Press : University of London.
- Jambi Dalam Angka. 1989. Jambi : Bappeda Tingkat I Jambi, BPS Kantor Statistik Provinsi Jambi.
- Keputusan Pleno Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) ke empat 5 Februari 1957 di Jambi.
- Keputusan Pleno Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) ke empat 6 Februari 1957 di Jambi.
- Kementerian Penerangan (1953) Provinsi Sumatera Tengah, Jakarta.
- Keputusan Sidang Pleno BKRD 24-25 November 1956 di Muaro Bungo.
- Laporan Sourry, W.Ph. Coolhaas, 1984. Oud Nieuwa uit Djambi dalam, Taufik Abdullah, Reaksi Terhadap Perluasan Kuasa Kolonial : Jambi dalam Perbandingan, Jakarta : Prisma LP3ES.
- Maklumat Panglima/Penguasa Militer TERR II Sriwijaya No. PM-001/12/1956 13 Desember 1956.
- Meilink, M.A.P Roelofs (1962) *Asian Trade and Europeon Influence*, Den Haag: Martinus Nijhott.
- Meng, Usman (1994) *Napak Tilas Lika-Liku Propinsi Jambi*. Jambi : Tanpa Penerbit
- Mutholib, J.A (1980) *Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi*. LP3ES.
- Monografi Daerah Jambi Jilid II, Jakarta Depdikbud.
- Pernyataan Bersama dalam Rapat Segitiga 21-22 Januari 1957 di Palembang.
- Pernyataan Pejuang Islam 23 Januari 1957 di Muaro Bungo.
- Pernyataan Kongres Rakyat Kerinci 12 Januari 1957 di Sungai Penuh, Kerinci.
- Pernyataan Ikrar Bersama Gerakan Pembela Provinsi Djambi (GPPD) 8 Januari 1957 di Jambi.
- Pidato Acting Gubernur Provinsi Jambi, Djamin Gelar Datuk Bagindo pada peresmian Provinsi Jambi 8 Februari 1957 di Jambi.
- Pidato H. Hanafie, Ketua BKRD pada peresmian Provinsi Jambi 8 Februari 1957 di Jambi.
- Pidato Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein pada peresmian Daerah Otonomi Tingkat I Jambi 8 Februari 1957 di Jambi.
- Pidato Radio Sjamsoe Bahroen 12 Januari 1957 di Jambi.
- Pidato Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein pada peresmian Daerah Otonomi Tingkat I Jambi 8 Februari 1957 di Jambi
- Pidato Radio Ketua Dewan Banteng Sumatera Tengah 9 Januari 1957 melalui RRI Studio Padang.
- Pidato Ibrahim, Sekretaris BKRD pada Kongres Rakyat Daerah Jambi 15-18 Juni 1956.
- Radio Gram Dewan Banteng 27 Januari 1957 kepada Ketua BKRD dan Residen Jambi di Jambi.
- Ripin, Ibrahim (1976) *Buku Petunjuk Relief, Jambi: Panitia Pengumpulan dan penelitian Bahan-bahan Sejarah Daerah Jambi*.
- Resolusi Konferensi Pasirah/DPM Sedaerah Jambi 16-18 Januari 1955.
- Resolusi Rapat Raksasa Rakyat Jambi 16-18 April di Muaro Tebo.
- Resolusi Alim Ulama Cerdik Pandai Marga VII Koto Muaro Tebo 1 Februari 1957 di Muaro Tebo.
- Resolusi Kongres Pemuda Sedaerah Jambi kedua yang berlangsung 3-5 Januari 1957 di Jambi.
- Surat Keputusan Ketua Dewan Banteng Sumatera Tengah No. 009/KD/U/Kpts-57 8 Februari 1957.
- Surat Panglima/Penguasa Militer T.T. II Sriwijaya No. B-001/SMP/57 Kepada Ketua/Anggota BKRD tertanggal 10 Januari 1957.
- Surat BKRD No. 74/BKRD/56 5 Desember 1956.
- Surat Dewan Banteng Sumatera Tengah, No. 046/DBST/56 19 Desember 1956.
- Telegram Sekretaris Komite PKI Batanghari kepada Pemerintah Pusat di Jakarta 10 Januari 1957.

Telegram partai-partai Politik di Kerinci kepada
Menteri Dalam Negeri dan Seksi G
Parlemen RI di Jakarta 10 Januari 1957.